



Judul	: BPKH Transparan Dong, Dana Umat Harus Jelas
Tanggal	: Sabtu, 21 Januari 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 4

BPKH Transparan Dong, Dana Umat Harus Jelas

Pemerintah mengusulkan Ongkos Naik Haji atau ONH yang ditanggung jemaah naik menjadi Rp 69 juta. Namun, usulan itu dinilai bisa memberatkan jemaah.

ANGGOTA DPD Abdul Kholik mengatakan, usulan kenaikan ONH harus dikaji mendalam oleh semua pihak. Mengingat, kenaikan biaya ini tergolong cukup tinggi karena tahun lalu ONH masih di kisaran Rp 36 juta.

"Adanya kenaikan drastis ONH ini berpotensi memberatkan jemaah. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi masih belum pulih sepenuhnya," ungkap Kholik di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga harus terbuka menjelaskan soal ini.

Kholik mengungkapkan, kemampuan rata-rata masyarakat Indonesia baru bisa menabung untuk haji kurang lebih pada usia 40 tahun. Mereka pun naik haji lebih karena keinginan menyempurnakan rukun Islam, ketimbang kemampuan ekonominya.

"Bila biaya ONH terus naik, makin sulit kesempatan orang Indonesia pergi haji. Padahal itu cita-cita setiap orang Islam," ujarnya.

Dia berharap, model pengelolaan dana haji bisa memberikan hasil optimal. Ke-

mudian dapat digunakan untuk menekan kenaikan biaya haji.

"Sekarang, kami mempertanyakan hasil usaha investasi dana haji sampai seberapa besar dan kemanfaatannya digunakan untuk apa saja," kata Kholik.

Sebelumnya, usulan kenaikan biaya haji ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR, Kamis (19/1). Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dalam raker itu, Yaqut mengusulkan agar jemaah menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriyah sebesar Rp 69 juta. Jumlah ini naik dari tahun 2022 yang berada di angka Rp 39,8 juta.

Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00, akomodasi Mekah Rp 18.768.000,00, akomodasi Madinah Rp 5.601.840,00, biaya hidup Rp 4.080.000,00, visa Rp 1.224.000,00 dan paket layanan Masyair Rp 5.540.109,60.

Yaqut menegaskan, dari BPIH sebanyak Rp 98,8 juta yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp 69 juta atau 70 persennya. Sementara 30 persen sisanya ditanggung dana milai manfaat sebesar Rp 29,7 juta.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah siap mendukung pelaksanaan haji 1444H/2023M yang akan diselenggarakan Mei mendatang.

"Sebab, keuangan haji saat ini sehat. Posisi penempatan dana di bank per Desember 2022 sebesar Rp 48,97 triliun, atau lebih dari 2 kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji," jelas dia.

Fadlul mengungkapkan, dana kelola ibadah haji 2023 meningkat 4,56 persen dari tahun 2021. Perbandingannya dengan tahun 2021 adalah Rp 158,79 triliun dan kini menjadi Rp 166,01 triliun.

Anggota Badan Pelaksana BPKH bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Acep Riana Jayaprawira meminta masyarakat tidak khawatir mengenai keuangan haji. Dia memastikan setoran awal colon jemaah haji aman.

"Tidak akan terjadi ponzi bahwa uang jemaah ini dipakai sama yang itu, nggak ada," tegas dia.

Acep menambahkan, proyeksi nilai manfaat keuangan haji diharapkan mampu memenuhi sebagian BPIH. Adapun

target nilai manfaat tahun 2023 sebesar Rp 10,12 triliun. "Dana terkait akan digunakan utamanya untuk BPIH, kegiatan kemaslahatan (CSR), dan alokasi Nilai Manfaat Virtual Account," urai dia.

AKUN @yudi_hudaya mengatakan, usulan kenaikan ONH ada hubungannya dengan menipisnya anggaran haji yang dikelola BPKH. Kata dia, kenaikan tarif haji merupakan tanda-tanda dana haji telah macet, dan dana cash menipis tidak cukup untuk memberangkatkan jemaah.

"Kalo biaya riil naik haji Rp 70 juta, maka Pemerintah akan subsidi cuma Rp 1 juta. Nah dana haji yang dikelola BPKH bakal turah-turah (berlebihan). Terus dana nanya kan bisa dianukan. Kalau ndak ya dianu-anukan," ujar @ThePipins.

AKUN @muttaqien_da curiga ada yang tidak beres dengan BPKH. Sehingga, layak untuk diaudit. Soalnya, subsidi haji turun dari 70 persen menjadi 30 persen dengan alasan agar dana haji di BPKH tidak *collapse*. "BPKH transparansinya kurang," timpal @thinktung08.

AKUN @panca66 mendesak BPKH lebih transparan. Sehingga, dana yang disetorkan umat menjadi jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Dia memperkirakan, dana haji yang mencapai Rp 163 triliun sudah terpakai. ■ ASI